

Perspektif Teori Sosiologi

Prof. Dr. Partini, SU
Dr. Hempri Suyatna, M.Si.



PENDAHULUAN

Sosiologi sebagai sebuah ilmu memiliki pengertian yang sangat luas sejak pertama dikemukakan oleh Auguste Comte pada tahun 1831, dalam buku *Positive Philosophy*. Perlu Anda ketahui, batasan terhadap **ilmu sosiologi sendiri terus berkembang dan memiliki karakteristik tersendiri yang masing-masing tokoh dalam mengemukakan pendapatnya sangat dipengaruhi oleh latar belakang, sudut pandang, serta perspektif yang berbeda**. Purwanto (2007:8) menjelaskan terdapat tiga tokoh yang memiliki andil cukup signifikan dalam membangun sosiologi. Auguste Comte yang diakui sebagai *the founding fathers* menjelaskan sosiologi sebagai sebuah ilmu positif tentang masyarakat. Dalam pandangannya dimaknai bahwa masyarakat mengalami perubahan dari (yang pada awalnya) tahap teologis, kemudian berubah dalam periode metafisik hingga pada akhirnya berkembang menjadi masyarakat yang positifistik. Tokoh lain, yaitu Weber menyatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif mengenai aktivitas/tindakan sosial manusia atau masyarakat, sedangkan Durkheim menjelaskan pandangannya mengenai sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari fenomena atau fakta sosial.

Pemahaman terhadap pengertian-pengertian sosiologi dari berbagai perspektif yang berbeda akan dapat membantu Anda untuk memahami serta menganalisis berbagai persoalan yang tengah terjadi di masyarakat. Masalah-masalah sosial (*social problems*) merupakan sebuah gejala (fenomena) sosial yang memiliki dimensi/aspek kajian sangat luas atau kompleks dan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang (perspektif). Oleh karena studi yang kompleks tersebut maka sebuah gejala (fenomena) dikatakan sebagai masalah (*problem*) jika dilihat dari perspektif teori struktural fungsional, misalnya belum tentu akan dipandang sama, jika dilihat dari perspektif konflik ataupun

perspektif interaksionisme simbolik. Hal inilah yang akan coba dikupas melalui pembahasan pada bagian-bagian dalam modul ini.

Saudara mahasiswa, pada peta kompetensi mata kuliah masalah-masalah sosial, modul 1 terjabarkan pada TIK 1, dan pembahasan dalam modul ini terbagi dalam tiga kegiatan belajar. Pada Kegiatan Belajar 1, akan dijelaskan mengenai teori sosiologi dilihat dari perspektif struktural fungsional. Pada Kegiatan Belajar 2, akan disajikan teori sosiologi jika dilihat dari perspektif konflik, sedangkan pada Kegiatan Belajar 3, akan dibahas mengenai teori sosiologi dari perspektif interaksionisme simbolik. Setiap kegiatan belajar, akan memiliki peta kompetensi khusus sehingga Anda dapat mengetahui materi-materi yang akan dijelaskan.

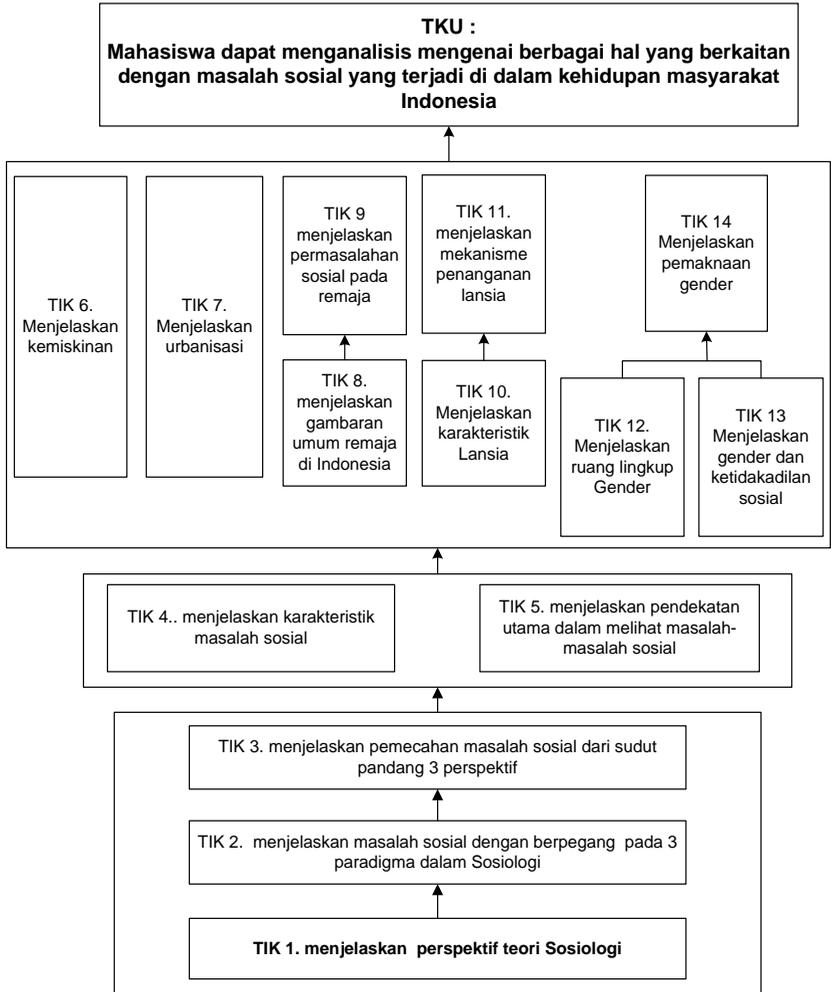
Dengan memahami teori-teori sosiologi dari berbagai perspektif tersebut, akan membantu Anda dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang terjadi dengan berpegang pada perspektif yang ada. Dengan demikian, Anda diharapkan akan mampu bersikap kritis terhadap berbagai persoalan yang ada dengan dibekali perspektif tersebut.

Diharapkan setelah mempelajari modul ini, secara umum Anda mampu menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan teori sosiologi. Secara khusus, Anda mampu menjelaskan:

1. masalah sosial dilihat dari perspektif struktural fungsional;
2. masalah sosial dilihat dari perspektif konflik;
3. masalah sosial dilihat dari interaksionisme simbolik;
4. melakukan analisis serta mencari pemecahan terhadap masalah sosial yang ada.

Selamat Belajar dan Semoga Sukses!

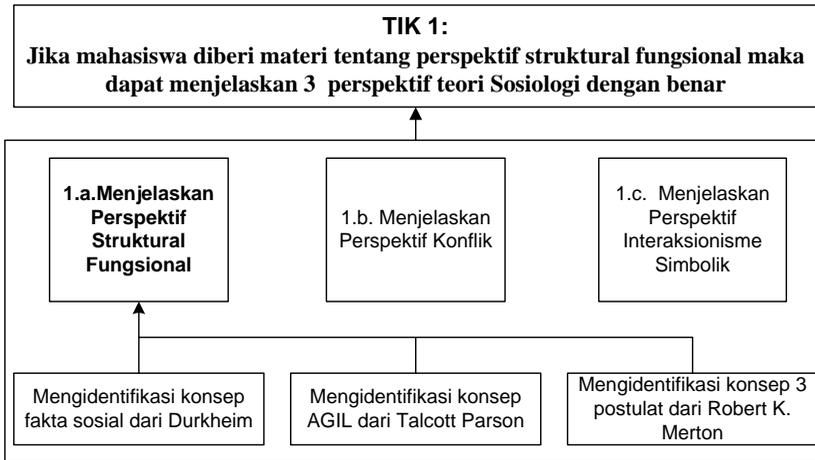
**Peta Kompetensi Mata Kuliah
Masalah-Masalah Sosial
SOSI4307**



KEGIATAN BELAJAR 1

Perspektif Struktural Fungsional

Peta Kompetensi Khusus Kegiatan Belajar 1



Terdapat beberapa tokoh yang mengungkapkan pemahamannya mengenai perspektif struktural fungsional, diantaranya Auguste Comte, Herbert Spencer, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Emile Durkheim, Talcott Parson, Robert K. Merton, serta tokoh-tokoh lainnya. Perspektif struktural fungsional sangat erat kaitannya dengan **sebuah struktur yang tercipta dalam masyarakat**. Jika dipahami secara mendasar struktural dan fungsional berarti memiliki struktur dan fungsi, hal ini menunjukkan bahwa **manusia memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam tatanan struktur masyarakat**.

Pada awal mula kelahiran perspektif ini, Auguste Comte memiliki pandangan bahwa ilmu-ilmu sosial harus tetap menjadi ilmiah dan memandang biologi sebagai dasar melihat perkembangan manusia hingga lahirnya ilmu sosiologi. Dalam kajiannya, teori fungsionalisme mempelajari struktur dalam masyarakat, seperti halnya perkembangan manusia dalam struktur organisme. Nasikun (1991:10) menjelaskan bahwa fungsionalisme struktural mula-mula tumbuh dari cara melihat masyarakat yang dianalogikan dengan organisme

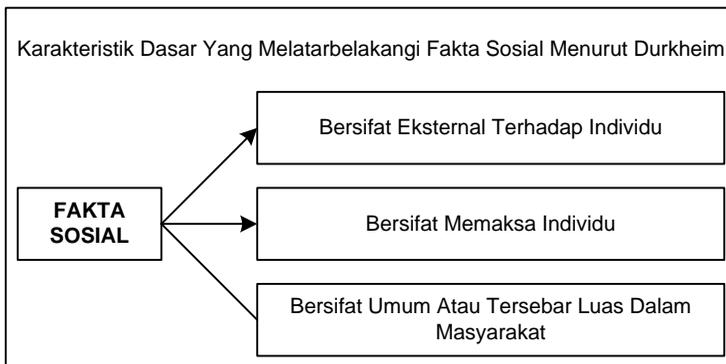
biologis, suatu pendekatan yang sering dikenal sebagai *organismic approach*. Cara-cara ini berkembang terutama pada awal pertumbuhan sejarah sosiologi.

Tokoh-tokoh seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer sangat terpengaruh oleh persamaan-persamaan yang terdapat antara organisme biologis dengan kehidupan sosial. Spencer bahkan pernah menyatakan bahwa masyarakat manusia adalah seperti suatu organisme. Aspek yang cukup penting dalam pemahaman perspektif ini adalah pengertian sistem yang diartikan sebagai suatu himpunan atau kesatuan dari unsur-unsur yang saling berhubungan selama jangka waktu tertentu dan atas dasar pola tertentu (Soekanto, 1982: 6). Tubuh manusia dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari orang-orang yang saling berhubungan misalnya, jantung, paru-paru, ginjal, otak, dan sebagainya. Setiap organ mempunyai satu atau beberapa fungsi tertentu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organ-organ lain, atau bahkan seluruh organisme tubuh.

Menurut beberapa sosiolog, lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dipandang sama seperti organ-organ dalam tubuh manusia. Lembaga sosial sebagai unsur struktur, dianggap dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan masyarakat. Suatu lembaga ekonomi misalnya, berfungsi untuk mengadakan produksi dan distribusi barang-barang serta jasa-jasa. Lembaga sosial keluarga misalnya, mempunyai fungsi reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan anak-anak, dan sebagainya. Demikianlah seperti itu, seterusnya setiap lembaga sosial mempunyai fungsinya masing-masing dan dalam hubungan antara satu dengan lainnya (Soekanto, 1982:7).

Durkheim sendiri memberikan pandangan mengenai struktur sosial relatif ortodoks. Ciri utama menurutnya adalah **bahwa struktur sosial terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma**. Bagi Durkheim pencapaian suatu kehidupan sosial dan keberadaan keteraturan sosial dalam masyarakat dinamakan solidaritas sosial sebagai standar atau aturan kolektif perilaku mereka. Pandangan Durkheim kebanyakan berkaitan dengan analisis fungsional dalam rangka memahami fungsi fakta sosial. Adapun untuk memahami dan menjelaskan fakta sosial tersebut, Durkheim mengemukakan tiga karakteristik dasar yang melatarbelakanginya. Purwanto (2007:124-125) menjelaskan yang *pertama*, yaitu fakta sosial bersifat eksternal terhadap individu. Fakta sosial tersebut merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang memperlihatkan sesuatu kesadaran yang berada di luar kesadaran individu. Seseorang mungkin pernah merasakan bahwa sebagai anggota baru dalam suatu kelompok akan mengalami adanya aturan atau norma yang tidak sepenuhnya

dapat dimengerti sehingga hal tersebut jelas dapat dilihat sebagai sesuatu yang eksternal. *Kedua*, yaitu fakta sosial bersifat memaksa individu. Sebagai anggota dari suatu kelompok atau masyarakat, individu selalu dipengaruhi, dibimbing, didorong, diyakinkan, atau dipaksa oleh fakta sosial yang melingkupinya untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kelompoknya. Melalui suatu proses sosialisasi (pembiasaan) maka perilaku dan tindakan yang dikerjakannya diharapkan tidak akan bertentangan dengan keinginan individu. Namun demikian, tatkala individu melakukan pelanggaran maka kekuatan fakta sosial akan memaksa baik secara formal dengan pemberian sanksi/hukuman, maupun secara informal melalui peringatan maupun sindiran-sindiran. *Ketiga*, yaitu fakta sosial bersifat umum atau tersebar luas dalam masyarakat. Fakta sosial merupakan milik bersama, bukannya merupakan sifat individu perorangan. Fakta sosial bersifat kolektif dan berpengaruh terhadap individu karena sifat kolektif tersebut.



Sumber: Purwanto, 2007.

Saudara mahasiswa, coba Anda berikan contoh dari fakta sosial, dan berikan alasannya mengapa contoh yang Anda kemukakan tersebut merupakan suatu fakta sosial!

Anda perlu memahami terlebih dahulu tentang tiga karakteristik dari fakta sosial

Dalam perkembangannya, cara pandang perspektif struktural fungsional ini, kemudian dikembangkan oleh Parsons dan para pengikutnya, dengan sejumlah anggapan dasar mereka (Nasikun, 1991:11-12). Yang *pertama*, masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. *Kedua*, dengan demikian hubungan saling memengaruhi yang terjalin diantara bagian-bagian tersebut menjadi bersifat ganda dan timbal balik. *Ketiga*, sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis. *Keempat*, sekalipun terdapat disfungsi, ketegangan-ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan, akan tetapi dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkat yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah tersebut.

Cara pandang Parsons selanjutnya, yaitu bahwa perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui sebuah proses penyesuaian-penyesuaian dan tidak terjadi secara revolusioner. Perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis pada umumnya hanya mengenai bentuk luarnya saja, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak mengalami perubahan signifikan. Menurut Parsons, **faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus diantara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu**. Di dalam setiap masyarakat menurut pandangan struktural fungsional, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu dan sebagian besar anggota masyarakatnya menerima serta menganggapnya sebagai suatu hal yang mutlak benar. Sistem nilai tersebut, tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus juga merupakan unsur yang dapat menstabilkan sistem budaya itu sendiri.

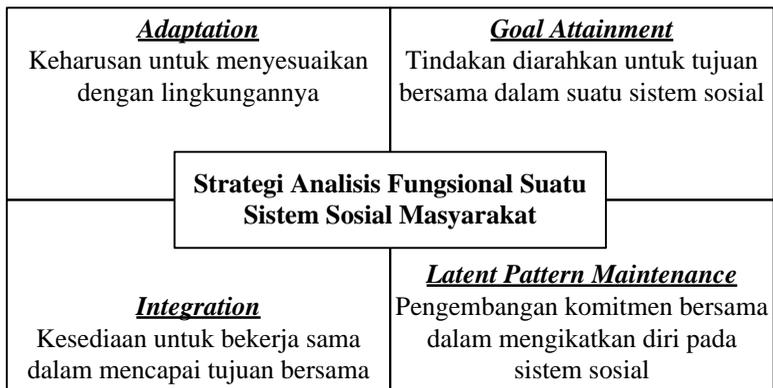
Dalam perkembangannya, **sistem sosial memiliki empat masalah pokok yang harus dipecahkan apabila harus mempertahankan kelestarian eksistensinya**. Keempat masalah pokok tersebut adalah (1) masalah bagaimana mengamankan dari lingkungan sistemik yang lebih besar fasilitas-fasilitas dalam jumlah yang cukup dan membagikan bagiannya itu ke seluruh bagian-bagian atau komponen-komponen, (2) masalah bagaimana menentukan kerangka prioritas di antara tujuan-tujuan sistem dan memobilisasikan sumber daya-

sumber daya sistem untuk mencapai tujuan tersebut, (3) masalah bagaimana mengoordinasikan dan mempertahankan hubungan-hubungan sistemik antara bagian-bagian atau komponen-komponen sistem, dan (4) masalah bagaimana memelihara kelestarian pola sistemik dan mengatasi tekanan-tekanan atau konflik-konflik sistemik yang timbul (Fisipol UGM, 1994 : 3).

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 1950, Robert F. Bales bersama Parsons menyusun strategi analisis fungsional suatu sistem sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks inilah **A-G-I-L** dikembangkan, yaitu seperangkat persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem sosial meliputi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, serta *Latent Pattern Maintenance* (Purwanto, 130:2007). *Adaptation*, menunjuk pada **keharusan bagi sistem sosial untuk menghadapi atau melakukan penyesuaian dengan lingkungannya**. Sebagai contoh, yaitu sistem budaya asing yang masuk ke Indonesia misalnya, dalam hal berpakaian. Dengan sendirinya secara tidak langsung budaya asing tersebut akan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia hingga pada akhirnya dari hasil adaptasi tersebut akan muncul suatu budaya tersendiri yang bercorak ke-Indonesiaan maupun budaya yang bercorak kebarat-baratan (*western*), atau perpaduan diantara keduanya. *Goal Attainment*, menunjuk pada persyaratan fungsional bahwa **tindakan itu diarahkan pada tujuan-tujuannya, terutama tujuan bersama dalam suatu sistem sosial**. Contohnya, ketika pemerintah akan membantu sebuah daerah terpencil dengan berbagai masalah seperti kesehatan, perumahan yang tidak layak, serta pendidikan. Dari sekian banyak masalah tersebut, dipilihlah masalah kesehatan sebagai tujuan utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mengingat dengan tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi, akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lainnya.

Integration, menunjuk pada persyaratan yang berhubungan dengan **interelasi antar anggota dalam suatu sistem sosial yang setidaknya harus ada solidaritas dan kesediaan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama**. Integrasi merupakan proses penyesuaian dari unsur-unsur pokok menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatukan bagian-bagian dari suatu sistem menjadi sebuah sistem yang memiliki fungsi. Sebagai contoh, seorang mahasiswa harus menjalin hubungan yang baik dengan dosen dan mahasiswa lainnya, hal ini dilakukan untuk menjamin adanya ikatan emosional di dalam sistem sosial agar menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerja sama. Dalam suatu masyarakat yang sangat terdiferensiasi, fokus primer dari fungsi integratif didapati dalam sistem norma-norma legalnya dan pelaku-pelaku yang

berhubungan dengan manajemennya, terutama pengadilan dan profesi hukum. Norma-norma legal pada tingkat ini, bukan pada tingkat undang-undang dasar yang maha tinggi, mengatur alokasi hak-hak dan kewajiban, fasilitas dan imbalan antarunit dalam sistem yang kompleks, norma-norma seperti itu membantu penyesuaian-penyesuaian internal yang cocok dengan stabilitas sistem nilai, atau perubahan yang teratur selain dengan adaptasi terhadap permintaan-permintaan yang berubah dari situasi eksternal. Pelembagaan uang dan kekuasaan terutama merupakan fenomena integratif, seperti mekanisme kendali-kendali sosial dalam pengertian yang lebih sempit. Dalam sistem sosial, fungsi integratif adalah fokus dari sifat-sifat dan proses-prosesnya yang paling menonjol. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa masalah-masalah yang berfokus sekitar fungsi-fungsi integratif sistem-sistem sosial merupakan inti sentral dari masalah-masalah teori sosiologis.



Sedangkan *Latent Pattern Maintenance*, menunjuk pada berhentinya interaksi, artinya **dikembangkannya komitmen atas pola-pola budaya bersama dalam mengikatkan diri pada sistem sosial masyarakat** misalnya, peran keluarga dan lembaga pendidikan untuk menjaga norma-norma dan sistem sosial yang ada di masyarakat.

Coba Anda berikan contoh dari masing-masing konsep dalam A-G-I-L, sudah tentu selain contoh yang sudah dikemukakan dalam modul ini. Anda dapat mengamati lingkungan sekitar Anda!

A= adaptation, G = goal attainment, I = integration,
L = latent pattern maintenance

Dalam perspektif Parson, sistem sosial juga merupakan subsistem dari suatu sistem yang lebih besar, oleh karena itu berhubungan dengan sub-subsistem lain yang lebih besar. Talcot Parsons (Turner dalam Fisipol UGM, 1994:4-5) melukiskan bahwa sistem sosial sebagai subsistem dari sistem tindakan yang terdiri atas hierarki sibermetik dari (1) subsistem biologi, (2) subsistem kepribadian, (3) subsistem sosial, dan (4) subsistem kebudayaan. Hubungan di antara keempat subsistem tindakan tersebut dijelaskan oleh Parson sebagai hubungan antara kontrol informasional dan kondisi energi manakala subsistem tindakan yang memiliki hierarki tinggi mengendalikan subsistem tindakan yang lebih rendah di dalam pertukaran informasi dan sebaliknya, subsistem tindakan yang lebih rendah memberikan kondisi energi bagi subsistem tindakan pada hierarki yang lebih tinggi. Sebagai contoh, subsistem kebudayaan menguasai atau membatasi ruang lingkup bekerjanya norma-norma dari subsistem sosial, dan pada gilirannya norma-norma sosial yang terungkap sebagai harapan-harapan bagi aktor yang memainkan peran sosial membatasi motif-motif dan proses pengambilan keputusan pada tingkat subsistem kepribadian, yang seterusnya memengaruhi proses-proses pengambilan keputusan pada tingkat subsistem kepribadian, yang seterusnya memengaruhi proses-proses biokimiawi pada tingkat subsistem biologi. Sebaliknya, tiap subsistem di dalam hierarki sibermetik memberikan kondisi energi yang diperlukan bagi bekerjanya subsistem tindakan pada hierarki yang lebih tinggi.

Dalam pemahaman mengenai teori struktural fungsional maka sistem-sistem lingkungan dekat dari suatu sistem sosial, bukanlah sistem-sistem lingkungan fisis. Sebaliknya sistem-sistem itu adalah sub-subsistem primer lainnya dari sistem tindakan umum, yaitu kepribadian-kepribadian masing-masing anggota, aspek-aspek yang terorganisir secara perilaku dari organisme-organisme yang mendasari kepribadian itu, dan sistem-sistem budaya yang relevan sejauh sistem-sistem itu tidak sepenuhnya terlembaga dalam sistem

sosial, tetapi melihat komponen-komponen selain pola budaya normatif yang dilembagakan (Hamilton, 1990 : 189).

Tokoh lain yang mengembangkan perspektif ini adalah Robert K. Merton, yang menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional memusatkan perhatiannya pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kebudayaan. Menurutnya objek apapun yang dapat dianalisis secara struktural fungsional harus mempresentasikan unsur-unsur standar dalam hal ini, yaitu yang terpola dan berulang. Merton menyebut hal tersebut sebagai peran sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat kontrol sosial, dan lain sebagainya (Merton dalam Ritzer dan Goodman, 2008:268). Merton memberikan definisi terhadap fungsi, yaitu merupakan konsekuensi-konsekuensi yang disadari dan yang menciptakan adaptasi atau penyesuaian suatu sistem. Adapun perlu dipahami juga bahwa sebuah fakta sosial dapat mengandung tidak hanya konsekuensi positif, namun juga konsekuensi negatif bagi fakta sosial lainnya. Untuk itu, selain pandangannya terhadap fungsi, Merton mengembangkan pula gagasan **disfungsi**, yaitu ketika struktur atau institusi dapat memberikan kontribusi pada terpeliharanya bagian lain dalam sistem sosial, mereka pun dapat mengandung konsekuensi negatif bagi bagian-bagian lain tersebut (Ritzer dan Goodman, 2008:269).

Dalam penjelasannya mengenai teori struktural fungsional ini, Robert Merton (dalam Poloma, 2004:35) mengutip tiga postulat yang terdapat dalam analisis fungsional yang kemudian disempurnakan satu per satu. *Postulat pertama*, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan ketika seluruh bagian sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau di atur. Paradigma Merton menegaskan bahwa disfungsi (elemen disintegratif) tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif (elemen integratif). Ia menegaskan bahwa apa yang fungsional bagi suatu kelompok, dapat tidak fungsional bagi keseluruhan. *Postulat kedua*, yaitu fungsionalisme universal. Fungsionalisme ini menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Merton memperkenalkan konsep disfungsi maupun fungsi positif. Beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsional. Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional yang menimbang fungsi positif relatif terhadap fungsi negatif. *Postulat ketiga*, adalah postulat *indispensability*. Dalam setiap tipe peradaban,

setiap kebiasaan, ide, objek materiil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat ini masih kabur, belum jelas apakah fungsi (suatu kebutuhan sosial, seperti reproduksi anggota-anggota baru) atau item (sebuah norma, seperti keluarga batih) merupakan suatu keharusan. Dengan demikian, postulat *indispensability* mengandung dua pernyataan yang berkaitan, tetapi dapat dibedakan satu sama lain. *Pertama*, bahwa ada beberapa fungsi tertentu yang bersifat mutlak dalam pengertian bahwa kecuali apabila mereka dijalankan maka masyarakat (atau kelompok maupun individu) tidak akan ada. Hal ini selanjutnya melahirkan konsep prasyarat fungsional atau prakondisi-prakondisi yang secara fungsional perlu bagi eksistensi masyarakat. *Kedua*, masalah lain yang sama pentingnya menganggap bahwa bentuk sosial atau kultural tertentu adalah mutlak untuk memenuhi masing-masing fungsi tersebut.

Fenomena sosial yang dapat dijadikan sebagai contoh antara fungsi dan disfungsi sebagai sebuah konsekuensi dalam suatu sistem sosial adalah fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bekerja sebagai TKI di luar negeri dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai peluang untuk memperoleh penghasilan yang tinggi, serta dapat memenuhi kebutuhan materialistisnya, khususnya bagi kaum ibu. Dengan menjadi TKI seseorang rela meninggalkan anak dan keluarganya untuk dapat memperoleh penghasilan yang cukup. Hal ini tentu menjadi dilema tersendiri, ketika seseorang yang ingin membahagiakan keluarganya harus pergi ke luar negeri menjadi TKI, sebagai pilihan yang paling realistis untuk mencukupi kebutuhan materinya.

Akan tetapi di sisi lain, terdapat sebuah konsekuensi yang mungkin dapat timbul ketika mereka harus pergi meninggalkan anak dan keluarganya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan berpisah tersebut, tidak menutup kemungkinan seorang anak menjadi haus akan kasih sayang. Mereka hanya memikirkan yang baik baginya, akan tetapi tidak memikirkan bagaimana konsekuensi yang akan di alami oleh seorang anak atau keluarga yang di tinggalkan. Bisa saja bagi anak yang ditinggalkan akan mengalami gejala-gejala atau kelainan yang tidak di inginkan oleh orang tua, bermula dari kurangnya kasih sayang, kemudian menjadi guncangan mental yang berdampak pada perbuatan-perbuatan menyimpang yang justru merugikan dirinya dan keluarganya.

Fenomena TKI tersebut, jika dikaitkan dengan gagasan Merton maka dapat dianggap sebagai sebuah disfungsi atau ketidakberfungsian sebuah pranata

sosial, dalam hal ini adalah keluarga. Fungsi orang tua, khususnya seorang ibu yang paling utama adalah memberikan pendidikan dan kasih sayang yang penuh dalam sebuah keluarga, agar anak-anaknya dapat menjadi seperti yang mereka dambakan. Dengan memilih menjadi TKI untuk mengejar kebutuhan materialistisnya, berarti dia telah mengorbankan kasih sayang dan pendampingan yang seharusnya diberikan dalam membesarkan anaknya. Dalam kasus ini, seorang anak yang berperilaku menyimpang tidak dapat serta merta disalahkan karena baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut merupakan salah satu dampak dari hilangnya kasih sayang yang seharusnya diperoleh.

Perspektif fungsional melihat struktur pada pandangan makro, yaitu lebih terfokus pada bagaimana masyarakat terbentuk dan juga menjaga tindakan sosial yang ada. Masalah sosial tidak hanya dilihat sebagai tindakan baik atau buruk, tetapi lebih kepada bagaimana masalah tersebut dapat memengaruhi masyarakat dan juga fungsinya. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai masalah sosial yang dapat dijadikan sebagai contoh untuk membangun pola pikir Anda terhadap perspektif struktural fungsional ini. Contoh lainnya, adalah fenomena anak jalanan. Bagi sebagian pihak, fenomena ini jelas dipandang sebagai sebuah masalah sosial ketika keberadaan mereka dianggap meresahkan serta mengganggu aktivitas, serta tatanan kota. Namun di sisi lain, adanya anak jalanan tersebut bagi kalangan LSM tentu akan dapat menjadi keuntungan tersendiri, karena dapat menjadi sebuah kegiatan bagi penanggulangannya. Selain itu, bagi organisasi pemerintah maupun swasta misalnya, keberadaan anak jalanan dapat dijadikan sebagai sebuah program untuk mengatasinya sekaligus menjadi kritik bagi pemerintah dalam hal pengelolaan kependudukannya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Buatlah skema yang menggambarkan inti pemikiran dari tokoh-tokoh perspektif struktural fungsional!

Petunjuk Jawaban Latihan

Tokoh-tokoh dalam perspektif struktural fungsional adalah Auguste Comte, Talcot Parson, Emile Durkheim, Robert K Merton, serta Herbert Spencer. Setiap tokoh memiliki fokus perhatian. Diskusikan dengan teman Anda.



RANGKUMAN

Terdapat beberapa tokoh yang mengungkapkan pemahamannya mengenai perspektif struktural fungsional. Perspektif ini sangat erat kaitannya dengan sebuah struktur yang tercipta dalam masyarakat. Pada awal mula kelahiran perspektif ini, Auguste Comte memiliki pandangan bahwa ilmu-ilmu sosial harus tetap menjadi ilmiah dan memandang biologi sebagai dasar melihat perkembangan manusia hingga lahirnya ilmu sosiologi. Dalam kajiannya, teori fungsionalisme mempelajari struktur dalam masyarakat, seperti halnya perkembangan manusia dalam struktur organisme. Herbert Spencer bahkan pernah menyatakan bahwa masyarakat manusia seperti suatu organisme. Oleh beberapa sosiolog, lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dipandang sama, seperti organ-organ dalam tubuh manusia. Lembaga sosial sebagai unsur struktur, dianggap dapat memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup dan pemeliharaan masyarakat.

Durkheim sendiri memberikan pandangan bahwa struktur sosial terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma. Adapun untuk memahami dan menjelaskan fakta sosial tersebut, Durkheim mengemukakan tiga karakteristik dasar yang melatarbelakanginya, yaitu fakta sosial bersifat eksternal terhadap individu, fakta sosial bersifat memaksa individu, dan fakta sosial bersifat umum atau tersebar luas dalam masyarakat.

Robert F. Bales bersama Parsons juga menyusun strategi analisis fungsional suatu sistem sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks inilah A-G-I-L dikembangkan, yaitu seperangkat persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem sosial meliputi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, serta *Latent Pattern Maintenance*.

Tokoh lain yang mengembangkan perspektif ini adalah Robert K. Merton, yang menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional memusatkan perhatiannya pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kebudayaan. Menurutnya objek apapun yang dapat dianalisis secara struktural fungsional harus mempresentasikan unsur-unsur standar, yaitu yang terpolakan dan berulang. Merton juga memberikan definisi terhadap pemahaman fungsi dan disfungsi yang terjadi dalam fakta sosial.

TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tokoh yang mengungkapkan pemahamannya mengenai perspektif struktural fungsional adalah
 - A. Herbert Mead
 - B. Erving Goffman
 - C. Herbert Spencer
 - D. Horton Cooley

- 2) Tokoh yang memberikan pandangan mengenai struktur sosial relatif ortodoks adalah
 - A. Emile Durkheim
 - B. Auguste Comte
 - C. Herbert Spencer
 - D. Robert Merton

- 3) Berikut adalah karakteristik dasar dari fakta sosial, *kecuali* bersifat
 - A. berkelanjutan
 - B. eksternal
 - C. memaksa
 - D. umum

- 4) Berikut adalah seperangkat persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem sosial yang digagas oleh Parsons dengan istilah AGIL, *kecuali*....
 - A. *adaptation*
 - B. *goal attainment*
 - C. *interaction*
 - D. *latent pattern maintenance*

- 5) Perspektif fungsional melihat struktur pada pandangan
 - A. mikro
 - B. meso
 - C. makro
 - D. mikro dan makro

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

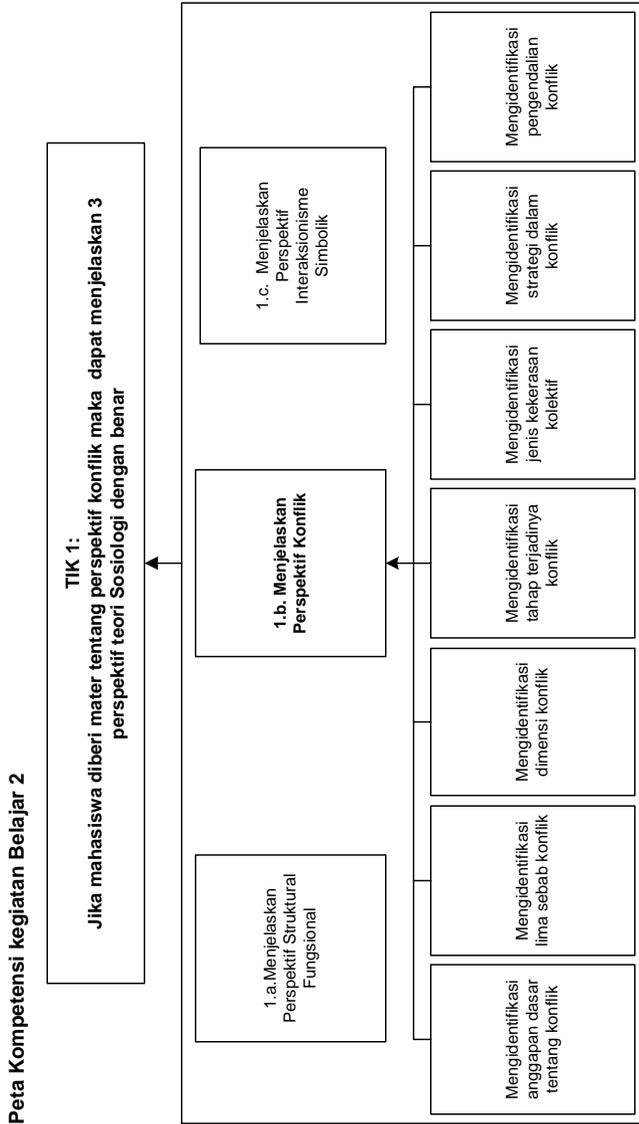
70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Perspektif Konflik



Konflik tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial masyarakat. Konflik sosial merupakan gejala universal dan selalu ada di masyarakat.

Tidak ada satu masyarakat pun yang dapat terbebas dari konflik. Potensi konflik yang ada di dalam masyarakat jika dibiarkan akan menjadi masalah sosial karena merusak integrasi dan solidaritas yang sudah terbentuk di masyarakat. Ada beberapa definisi mengenai konflik. Menurut Webster dalam Pruitt dan Rubin (2004:27), istilah *conflict* di dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Namun demikian, makna tersebut berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain. Pruitt dan Rubin (2004:27) mendefinisikan konflik sebagai suatu perbedaan persepsi mengenai kepentingan yang terjadi, ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam itu terjadi maka akan semakin mendalam bila aspirasi di satu pihak atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap.

Dalam suatu masyarakat terkadang dapat dijumpai hal-hal yang dianggap baik, akan tetapi hal yang dianggap baik tersebut, tidak banyak terdapat sehingga ada golongan-golongan tertentu yang merasa dirugikan (di samping mereka yang merasa diuntungkan). Contohnya adalah kekayaan material, kekuasaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Manusia cenderung untuk berupaya sebisa mungkin mendapatkan hal-hal tersebut. Jika ada lebih dari satu pihak yang menganggap sama-sama memiliki hak atas hal-hal tersebut, kemungkinan besar akan timbul suatu konflik atau pertikaian. Dalam konteks ini, konflik mencakup adanya proses ketika terjadi pertentangan hak kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan antara satu pihak dengan pihak yang lain manakala salah satu pihak berusaha menghancurkan pihak lain.

Model analisis yang dikembangkan dalam perspektif struktural fungsional, seperti yang telah dibahas sebelumnya, cukup berbeda dengan analisis yang dikembangkan dalam perspektif konflik ini. Pada perspektif struktural fungsional, yang ditekankan adalah integrasi, persamaan nilai, dan stabilitas sosial, sedangkan pada perspektif konflik yang ditekankan justru pertentangan, hubungan super ordinasi dan subordinasi, perbedaan kekuasaan, dan perubahan sosial. Salah satu pemahaman yang mewarnai perspektif konflik adalah teori yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam *Communist Manifesto* (1948). Mereka menganggap bahwa proses terpenting dalam

masyarakat adalah terjadinya pertentangan kelas (*class struggle*), menurut mereka suatu golongan yang sedang berkuasa memiliki kedudukan tersebut, oleh karena menguasai sarana produksi yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat (Soekanto, 1982:7).

Dalam perspektif ini, **masyarakat dilihat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha memelihara dan meningkatkan posisinya.** Berbeda dengan pandangan struktural fungsional yang percaya bahwa kelompok-kelompok terintegrasi sedemikian rupa, serta membentuk suatu hubungan yang saling melengkapi. Dalam perspektif konflik beranggapan bahwa kelompok-kelompok tersebut, mempunyai tujuan sendiri yang beragam dan tidak pernah terintegrasi. Dalam upaya mencapai tujuannya, suatu kelompok terkadang malah sering kali harus mengorbankan kelompok lain. Oleh karena itu, konflik akan selalu muncul ketika kelompok yang kuat akan selalu berusaha untuk meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya. Perjuangan untuk merebut, mengembangkan, dan mempertahankan kekuasaan terus-menerus berlangsung. Stabilitas hanya terjadi sesaat, yaitu ketika dominasi suatu kelompok harus memelihara keseimbangan dengan kelompok lain. Namun setelah itu, konflik sosial akan mewarnai kehidupan lagi (Usman, 2004 : 65).

Sependapat dengan hal tersebut, Dahrendorf dalam Nasikun (1991:17) menyatakan bahwa pendekatan konflik berpangkal pada beberapa anggapan dasar. *Pertama*, yaitu setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir atau dengan kata lain perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. *Kedua*, setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya. *Ketiga*, setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. Dan *keempat*, setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain. Para penganut pendekatan konflik memandang perubahan sosial sebagai gejala yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, bahkan lebih dari itu konflik dianggap bersumber di dalam faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat.

Menurut Dahrendorf (dalam Poloma, 2004 :136), pertentangan kelas harus dilihat sebagai kelompok-kelompok pertentangan yang berasal dari struktur kekuasaan asosiasi-asosiasi yang terkoordinir secara pasti. Kelompok-kelompok yang bertentangan itu, sekali mereka ditetapkan sebagai kelompok kepentingan, akan terlibat dalam pertentangan yang niscaya akan menimbulkan perubahan

struktur sosial. Dahrendorf juga menegaskan bahwa **kekayaan, status ekonomi, dan status sosial walau bukan merupakan determinan kelas, dapat juga memengaruhi intensitas pertentangan**. Ia mengetengahkan pertentangan proporsi bahwa semakin rendah korelasi antara kedudukan kekuasaan dan aspek-aspek status sosial ekonomi lainnya maka semakin rendah intensitas pertentangan kelas, dan sebaliknya. Dengan demikian, kelompok-kelompok yang menikmati status ekonomi relatif tinggi memiliki kemungkinan yang rendah untuk terlibat dalam konflik yang keras dengan struktur kekuasaan, daripada mereka yang terbuang dari status sosial ekonomi dan kekuasaan (Poloma, 2004:138).

Ciri lain dari teori konflik adalah **cenderung memandang nilai, ide, dan moral sebagai rasionalisasi untuk keberadaan kelompok yang berkuasa**. Kekuasaan tidak melekat dalam diri individu, tetapi pada posisi orang dalam masyarakat. Seseorang mempunyai kekuasaan bukan karena karakteristik personalnya dan bukan karena kualitas pribadinya, melainkan karena memiliki kemampuan untuk mengontrol sumber-sumber, seperti uang atau alat produksi. Pandangan ini juga menekankan bahwa fakta sosial adalah bagian dari masyarakat dan di luar dari sifat-sifat individual. Secara ringkas mungkin dapat dikatakan bahwa perspektif konflik seperti juga perspektif struktural fungsional yang berorientasi pada struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial. Hanya saja perbedaannya perspektif struktural fungsional melihat masyarakat adalah statis dan tersusun rapi, dan masing-masing bagiannya menyumbangkan stabilitas, dan menyebarkan nilai untuk memelihara kohesi. Sedangkan perspektif konflik memandang masyarakat terus-menerus berubah, dan masing-masing bagian dalam masyarakat potensial memacu dan menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial (*order*), teori ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan (Usman, 2004:66).

Dengan demikian, konflik akan muncul apabila ada beberapa aktivitas yang ada di dalam masyarakat saling bertentangan. Selain itu, adanya perubahan sosial yang tidak merata di dalam masyarakat juga akan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik di dalam masyarakat. Nyi dalam Hamidi (1995), mengungkapkan bahwa konflik paling tidak mempunyai **lima sebab**, yaitu *pertama* **kompetisi**, satu pihak berupaya meraih sesuatu dengan mengorbankan pihak lain, misalnya persaingan di dalam memperoleh jabatan-jabatan tertentu sehingga harus mengorbankan pihak lain. *Kedua* **dominasi**, satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar, yakni adanya pemaksaan dari satu pihak ke pihak lain. Misalnya, kuasa seorang

pemilik tanah terhadap para buruh-buruh tani. Kemudian eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik modal (juragan) kepada para buruh-buruhnya dengan upah yang minim dan jam kerja yang panjang. *Ketiga kegagalan*, menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian tujuan. Misalnya, calon pemimpin menyalahkan tim suksesnya ketika gagal mencapai tujuannya. *Keempat provokasi*, satu pihak sering menyinggung perasaan yang lain. Penyebab konflik karena provokasi muncul disebabkan adanya provokator yang memicu konflik, seperti perkataan-perkataan yang menghina dan merendahkan pihak lain. *Kelima perbedaan nilai*, terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar atau salahnya suatu masalah, misalnya dengan konflik yang berbau suku, ras, dan agama. Perbedaan nilai yang dipicu dengan perbedaan ekonomi sering menyebabkan terjadinya konflik. (Ustman, 2006:16).

Dilihat dari **akar penyebab konflik**, konflik tidak saja disebabkan karena persoalan ketimpangan sumber daya ekonomi atau produksi saja, akan tetapi disebabkan juga karena perebutan kekuasaan dan politik. Adanya legitimasi politik, hak memilih, dan strategi pembangunan sering menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Dalam perebutan kekuasaan dan politik ini akan melibatkan kelompok politik, agama, dan pendidikan. Konflik juga dapat disebabkan adanya perbedaan gagasan atau cita-cita yang menyangkut persoalan dominasi dan pandangan dunia dari kelompok masyarakat yang menyangkut doktrin agama, budaya, dan filsafat sosial maupun gaya hidup. Dengan demikian, konflik dapat disebabkan karena perbedaan ideologi dan agama, seperti konflik atas kapitalisme dan komunisme, atau muslim dengan nonmuslim, dan sebagainya. Sedangkan konflik yang berbasis identitas, dapat dilihat dari konflik antar etnis.

Konflik pada hakikatnya dapat dilihat dari beberapa **dimensi**, yaitu dimensi perilaku, dimensi sikap, dan dimensi konteks. Dalam dimensi perilaku, ditandai dengan adanya konflik terbuka yang ditandai dengan adanya kelompok yang bertikai. Konflik dapat dilihat dari adanya perselisihan antara individu atau kelompok di dalam masyarakat. Kemudian dimensi sikap adalah konflik yang tidak terlihat dan terlembagakan dalam kultur seperti persepsi, toleransi, dan nilai. Sebagai contoh, adalah perbedaan nilai dan persepsi yang sering terjadi karena perbedaan status ekonomi maupun status sosial di dalam masyarakat. Sedangkan dimensi konteks, adalah konflik yang tidak terlihat dan terlembagakan dalam struktur masyarakat seperti ekonomi, sosial, dan politik. Konflik ini adalah jenis konflik laten yang akan ditemui di dalam masyarakat.

Menurut Kusnadi (dalam Ustman, 2006:17) **proses terjadinya konflik dapat melalui 2 tahapan**, yaitu tahapan disorganisasi dan tahapan disintegrasi. Dalam tahap disorganisasi ini terdapat beberapa ciri yang ditemukan, yaitu banyak salah paham, norma mulai tidak dipatuhi, anggota banyak menyimpang, sanksi lemah. Dalam tahap ini, muncul berbagai bentuk penyimpangan atas norma dan nilai yang ada pada masyarakat. Nilai, norma, dan institusi lokal yang ada di dalam masyarakat mengalami disfungsi karena masyarakat tidak lagi menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Dengan demikian, muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap norma yang berkembang di masyarakat. Sedangkan tahap disintegrasi, yaitu timbul emosi (sikap benci), suka marah (ingin memusnahkan), dan ingin menyerang. Pada tahap ini muncul konflik terbuka di dalam masyarakat.

Dalam konflik ada yang dilakukan secara kekerasan maupun yang tidak dilakukan secara kekerasan. Nitibaskara (2004:202-205) menjelaskan bahwa kekerasan menunjuk pada adanya pola tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman maupun tindakan nyata yang menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap harta benda, fisik, maupun mengakibatkan kematian pada seseorang atau banyak orang. Dalam kekerasan ini selain dikenal kekerasan yang dilakukan individu, juga ada yang dilakukan secara kolektif. Dalam **kekerasan kolektif ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis kekerasan**, yaitu (1) Kekerasan kolektif primer yang terjadi pada komunitas lokal dan terjadi pada ruang lingkup terbatas. Kekerasan ini misalnya, perkelahian dan pertikaian yang terjadi di dalam masyarakat, yakni kekerasan antarpelajar/mahasiswa atau masyarakat umum; (2) Kekerasan kolektif reaksioner yang pada umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Dalam kekerasan ini tujuannya adalah menentang kebijakan atau sistem yang dianggap tidak adil. Kegiatan aksi demonstrasi dengan turun di jalanan sering kali berujung kepada tindak kekerasan; (3) Kekerasan kolektif modern, kekerasan ini pada umumnya merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisir secara baik. Sebagai contoh, gerakan-gerakan sosial dan politik yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan.

Di Indonesia sendiri tidak sedikit fenomena-fenomena sosial mengenai konflik yang dapat dijadikan sebagai contoh, salah satunya ialah konflik yang terjadi di Aceh antara pemerintah Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) beberapa waktu lalu. Jika kita analisis menggunakan perspektif konflik ternyata memang terdapat perbedaan-perbedaan kepentingan antara

GAM dengan pemerintah Indonesia. Perbedaan kepentingan terlihat pada keinginan GAM yang menginginkan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam diterapkan di Aceh. Padahal kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara majemuk dengan berbagai macam suku, adat, dan budaya, serta memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Indonesia sendiri juga bukanlah sebuah negara yang menganut ideologi Islam sebagai landasan negara. Di Indonesia tidak hanya ada agama Islam, melainkan juga terdapat agama-agama lain seperti Hindu, Kristen, Katolik, dan lain-lain yang memang diakui oleh pemerintah. Akan tetapi mengapa di Aceh ingin menggunakan hukum-hukum Islam, hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai hukum Indonesia sendiri. Ketika permasalahan ini berbenturan maka muncul konflik itu. Ada dua kepentingan yang berbeda, di satu sisi pihak GAM menginginkan Aceh menggunakan hukum Islam sedangkan di sisi lain, NKRI tidak.

Contoh lain yang sering terjadi adalah konflik antara masyarakat dengan perusahaan, baik perusahaan tambang maupun perusahaan-perusahaan perkebunan. Catatan Walhi, Tahun 2010 di Kalimantan Barat sedikitnya terjadi 200 konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kemudian dalam hal relasi masyarakat dengan perusahaan juga ditemukan bahwa konflik yang terjadi dikarenakan persoalan tanah, dampak lingkungan, dan kesehatan yang diakibatkan oleh operasional perusahaan dan tenaga kerja yang banyak tidak dapat terserap oleh perusahaan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, yaitu (1) Ketidakadilan pada masyarakat sekitar tambang (cara perusahaan mengembangkan sumber daya alam mengurangi kemampuan komunitas lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka); (2) Perusahaan dianggap memiliki akses yang luar biasa besar, sementara masyarakat tidak diberikan akses yang sama; (3) Kesempatan dan persaingan kerja. Pada umumnya, konflik ini dipicu oleh kesempatan kerja antara masyarakat pendatang di perusahaan dengan putra daerah. Sepanjang masyarakat di sekitar areal pertambangan sulit memperoleh pekerjaan, konflik di antara perusahaan tambang dan masyarakat akan tetap terjadi; (4) Hak ulayat dan hak individu. Konflik berakar dari ketidakpuasan masyarakat terhadap perusahaan akibat terambilnya tanah warisan dan ulayat masyarakat setempat. Tanah ulayat di klaim sebagai kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya (contoh, kasus pada konflik perebutan lahan); (5) Tidak optimalnya perusahaan menjalankan program *Corporate Social*

Responsibility (CSR) baik dari aspek ketepatan sasaran, maupun bentuk program CSR.

Pruitt dan Rubin (2004:28) menggolongkan lima macam **strategi yang digunakan oleh pihak-pihak yang mengalami konflik**. *Pertama*, adalah strategi *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain. *Kedua*, adalah *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan. Dalam strategi ini masing-masing pihak bersedia menerima kurang dari apa yang sebetulnya mereka inginkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. *Ketiga*, adalah *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif terbaik yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. *Keempat*, adalah *withdrawing* (menarik diri), yaitu lebih memilih untuk meninggalkan situasi konflik baik secara fisik maupun psikologis. Strategi ini cukup berbeda dengan strategi-strategi lainnya, yaitu *contending*, *yielding*, maupun *problem solving*, karena *withdrawing* melibatkan pengabaian terhadap kontroversi, sedangkan strategi lainnya tersebut mengandung upaya mengatasi konflik yang berbeda satu sama lain. Strategi yang *kelima*, adalah *inaction* (diam), yaitu dengan tidak melakukan apapun.



Sumber: Pruitt dan Rubin, 2004.

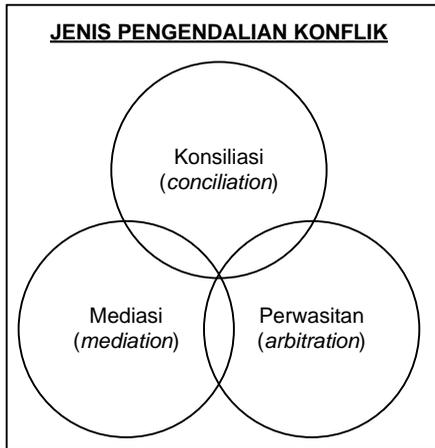
Nasikun (1991: 24-27) juga menjelaskan mengenai beberapa bentuk **pengendalian konflik** yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara konsiliasi (*conciliation*), mediasi (*mediation*), serta perwasitan (*arbitration*). Pengendalian konflik dengan cara **konsiliasi** (*conciliation*) dapat terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan

pengambilan-pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Sebagai contoh, misalnya dalam kehidupan politik, lembaga-lembaga semacam itu berupa badan-badan yang bersifat parlementer atau *quasi* parlementer manakala berbagai kelompok kepentingan atau wakil-wakil mereka saling bertemu satu sama lain untuk mewujudkan pertentangan-pertentangan mereka melalui cara-cara yang bersifat damai. Agar lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi efektif maka ada syarat dari lembaga-lembaga tersebut, yaitu (1) lembaga tersebut harus merupakan lembaga yang bersifat otonom sehingga mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain yang ada di luarnya; (2) kedudukan lembaga-lembaga tersebut harus bersifat monopolistik; (3) peranan lembaga-lembaga tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan satu sama lain merasa terikat kepada lembaga-lembaga tersebut, sementara keputusan-keputusannya mengikat kelompok-kelompok tersebut beserta dengan anggotanya; (4) lembaga-lembaga tersebut harus bersifat demokratis, dalam hal ini setiap pihak harus didengarkan dan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya sebelum keputusan-keputusan tertentu diambil.

Dalam keadaan upaya konsiliasi tidak dapat terwujud ketika lembaga-lembaga yang dimaksud tidak dapat berfungsi dengan baik maka suatu cara pengendalian yang lain dibutuhkan apabila pihak-pihak yang berkonflik tidak menghendaki timbulnya ledakan sosial dalam bentuk kekerasan. Cara pengendalian tersebut dikenal dengan cara **mediasi** (*mediation*), yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan masukan-masukan mengenai bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Sekalipun masukan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, namun cara pengendalian ini terkadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif, karena cara ini memungkinkan mereka yang bertentangan untuk dapat menarik diri tanpa kehilangan muka, mengurangi pemborosan yang dikeluarkan untuk membiayai konflik tersebut, dan sebagainya.

Apabila dengan menggunakan cara mediasi pun masih dirasa tidak cukup efektif maka suatu cara pengendalian ketiga yang disebut dengan **perwasitan** (*arbitration*) sangat mungkin sekali untuk dilakukan. Dalam cara ini, kedua pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima ataupun terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan

tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka. Berbeda dengan mediasi, yaitu kedua belah pihak yang bertentangan menyetujui untuk menerima pihak ketiga sebagai penengah (wasit), akan tetapi mereka bebas untuk menerima atau menolak keputusan-keputusan wasit, dalam cara *arbitration* menempatkan kedua belah pihak yang bertentangan pada kedudukan untuk harus menerima keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit.



Ketiga jenis pengendalian konflik tersebut di atas, dapat dipandang sebagai cara-cara pengendalian konflik yang bertingkat-tingkat, maupun dipandang sebagai cara-cara yang berdiri sendiri-sendiri, memiliki daya kemampuan untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan-kemungkinan timbulnya ledakan-ledakan sosial dalam bentuk kekerasan. Tidak menutup kemungkinan pula digunakan beberapa jenis dari pengendalian tersebut untuk mengatasi sebuah permasalahan, tergantung dengan kondisi konflik yang dihadapi dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Mengambil contoh terjadinya konflik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu antara pemerintah Indonesia dengan GAM, cara-cara pengendalian konflik tersebut di atas juga pernah dilakukan. Upaya konsiliasi (*conciliation*) telah dilakukan, yaitu dengan cara perundingan-perundingan maupun negosiasi antara kedua belah pihak, meskipun tidak menimbulkan titik terang dan konflik masih tetap berlangsung. Selanjutnya, upaya mediasi (*mediation*) juga dilakukan dengan melibatkan Badan Organisasi Non-Pemerintah (NGO). Hingga pada akhirnya dalam kurun waktu tahun 2005 pihak GAM dan pemerintah Indonesia memulai tahap

perundingan di Vantaa, Finlandia dengan mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan sebagai penengah (fasilitator). Perundingan tersebut menghasilkan nota kesepahaman yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Saudara mahasiswa, Anda pasti pernah mengalami konflik. Coba jelaskan kembali konflik yang pernah Anda alami tersebut dan bagaimana strategi yang Anda gunakan dalam mengatasi konflik tersebut!

Terdapat lima macam strategi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Buatlah skema yang menggambarkan inti pemikiran dari tokoh-tokoh perspektif konflik!

Petunjuk Jawaban Latihan

Tokoh-tokoh dalam perspektif konflik adalah Karl Marx, Dahrendorf, Friedrich Engels, yang masing-masing memiliki fokus perhatian tersendiri. Diskusikan dengan teman Anda.



RANGKUMAN

Konflik merupakan gejala universal yang ada di masyarakat. Dalam setiap masyarakat pasti mengandung potensi konflik. Tidak ada satupun masyarakat yang terbebas dari konflik. Pruitt dan Rubin (2004), mendefinisikan konflik sebagai suatu perbedaan persepsi mengenai kepentingan yang terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat

memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Dalam suatu masyarakat sosial terkadang dapat dijumpai hal-hal yang dianggap baik, akan tetapi hal yang dianggap baik tersebut tidak banyak terdapat sehingga ada golongan-golongan tertentu yang merasa dirugikan (di samping mereka yang merasa diuntungkan). Jika ada lebih dari satu pihak yang menganggap sama-sama memiliki hak atas hal-hal tersebut, kemungkinan besar akan timbul suatu konflik atau pertikaian.

Salah satu pemahaman yang mewarnai perspektif konflik adalah teori yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam *Communist Manifesto* (1948), menurut mereka suatu golongan yang sedang berkuasa memiliki kedudukan tersebut, oleh karena menguasai sarana produksi yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Dalam perspektif ini, masyarakat dilihat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha memelihara dan meningkatkan posisinya. Perspektif konflik beranggapan bahwa kelompok-kelompok tersebut mempunyai tujuan sendiri yang beragam dan tidak pernah terintegrasi. Dalam upaya mencapai tujuannya, suatu kelompok terkadang malah sering kali harus mengorbankan kelompok lain. Oleh karena itu, konflik akan selalu muncul.

Ciri lain dari teori konflik adalah cenderung memandang nilai, ide, dan moral sebagai rasionalisasi untuk keberadaan kelompok yang berkuasa. Kekuasaan tidak melekat dalam diri individu, tetapi pada posisi orang dalam masyarakat. Seseorang mempunyai kekuasaan bukan karena karakteristik personalnya dan bukan karena kualitas pribadinya, melainkan karena memiliki kemampuan untuk mengontrol sumber-sumber seperti uang atau alat produksi.

Terdapat beberapa strategi dalam penanganan konflik. Pruitt dan Rubin (2004) menggolongkan lima macam strategi yang digunakan oleh pihak-pihak yang mengalami konflik, yaitu *contending* (bertanding), *yielding* (mengalah), *problem solving* (pemecahan masalah), *withdrawing* (menarik diri), dan *inaction* (diam). Sedangkan Nasikun (1991) juga menjelaskan mengenai macam-macam bentuk pengendalian konflik yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara konsiliasi (*conciliation*), mediasi (*mediation*), serta perwasitan (*arbitration*).

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Model analisis yang dikembangkan dalam perspektif konflik adalah sebagai berikut, *kecuali*
 - A. perubahan sosial
 - B. perbedaan kekuasaan
 - C. pertentangan
 - D. stabilitas sosial

- 2) Tokoh yang mengembangkan *communist manifesto* adalah
 - A. Karl Marx dan Friedrich Engels
 - B. Karl Marx dan Herbert Spencer
 - C. Friedrich Engels dan Erving Gofman
 - D. Erving Gofman dan Horton Coley

- 3) Menurut Dahrendorf beberapa anggapan dasar yang digunakan dalam pendekatan konflik berpangkal pada kenyataan bahwa
 - A. perubahan sosial merupakan gejala yang terlepas di dalam setiap masyarakat
 - B. tidak semua masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya
 - C. tidak semua unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi
 - D. setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain

- 4) Dalam perspektif konflik, kekuasaan melekat dalam
 - A. diri individu
 - B. posisi orang dalam masyarakat
 - C. sistem ekonomi
 - D. lembaga hukum

- 5) Nyi mengungkapkan bahwa konflik paling tidak mempunyai lima sumber penyebab sebagai berikut, *kecuali*
 - A. ketidakberfungsian sistem
 - B. provokasi
 - C. kegagalan
 - D. kompetisi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

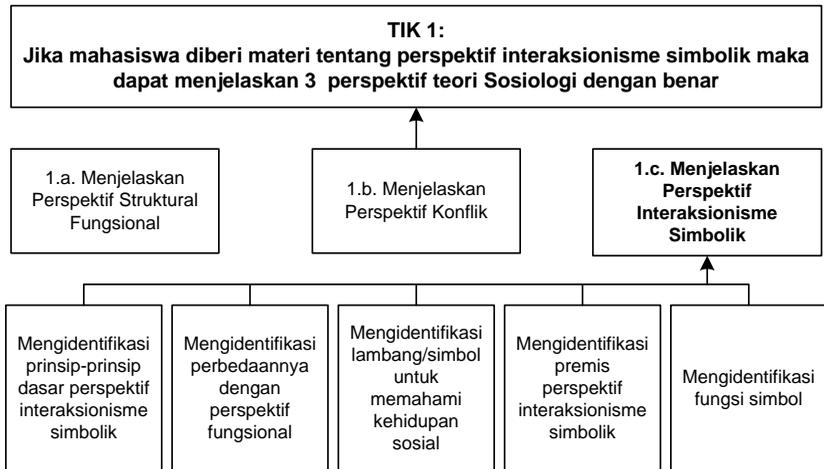
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Perspektif Interaksionisme Simbolik

Peta Kompetensi Kegiatan Belajar 3



Sebelum menerangkan lebih lanjut mengenai perspektif interaksionisme simbolik perlu dijelaskan terlebih dahulu perbedaan mendasar dengan perspektif-perspektif yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun dalam upaya menerangkan fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat, perspektif struktural fungsional memiliki cara pandang yang berbeda dengan perspektif konflik, namun pada dasarnya keduanya sama-sama menekankan pada struktur sosial. Dalam ilmu sosiologi teori yang berada pada posisi tersebut digolongkan bersifat makrososiologi, dalam hal ini asumsi dasar mereka sangat berbeda dengan asumsi yang bersifat mikrososiologi. Pada mikrososiologi penjelasan mengenai kehidupan sosial dan struktur sosial diasumsikan berada pada level individu atau lebih menekankan perhatiannya pada interaksi. Teori ini lebih menekankan pada tingkah laku nyata dari interaksi antarorang. Adapun pendekatan mikrososiologi yang cukup dikenal luas adalah interaksionisme simbolik.

Perspektif interaksionisme simbolik menekankan pada telaah mengenai bagaimana orang-orang berinteraksi baik pada tataran kelompok maupun

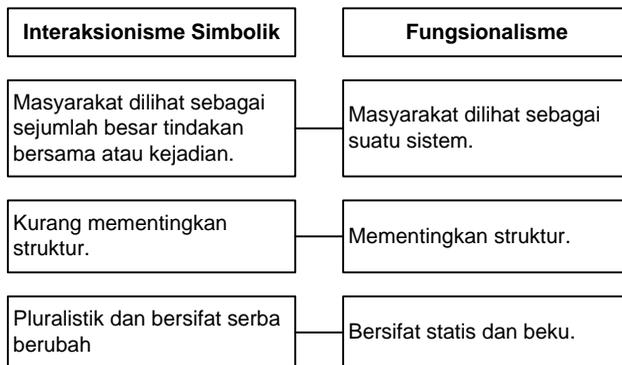
lembaga, masyarakat, atau negara. Beberapa tokoh sosiolog yang mengembangkan perspektif ini diantaranya George Herbert Mead, Charles Horton Cooley, W.I. Thomas, Herbert Blumer, dan Erving Goffman. Mereka penganut perspektif ini lebih memperhatikan **interaksi yang terjadi antara individu dan kelompok dengan menggunakan simbol-simbol, tanda-tanda, isyarat-isyarat, dan kata-kata yang berupa lisan maupun tulisan**. Manusia dapat bertindak tepat ketika telah menetapkan atau mengetahui sifat dan situasinya yang oleh W.I. Thomas dinyatakan sebagai definisi situasi. Sementara itu, Berger dan Luckman (1966) dalam Purwanto (2007:13) menjelaskan bahwa masyarakat itu nyata/objektif sekaligus subjektif dalam arti setiap pemahaman atas lembaga/masyarakat masih tergantung pada pandangan subjektif orangnya. Masyarakat atau lembaga dapat dikatakan baik atau buruk, sebagai pelayan atau penindas, sebenarnya hanyalah menjadi kenyataan bagi penilaiannya. Sementara itu, Goffman dan Blumer lebih menekankan pada tanggapan orang tidak secara langsung, melainkan dengan bagaimana mereka membayangkan orang itu.

Beberapa penganut interaksionisme simbolik (Blumer, 1969a; Manis dan Meltzer, 1978; A.Rose, 1962; Snow, 2001) dalam Ritzer dan Goodman (392:2008) mencoba mengemukakan **prinsip-prinsip dasar** teori ini, meliputi:

1. manusia ditopang oleh kemampuan berpikir, tidak seperti binatang yang lebih rendah,
2. kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial,
3. dalam interaksi sosial orang mempelajari makna dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir tersebut,
4. makna dan simbol memungkinkan orang melakukan tindakan dan interaksi khas manusia,
5. orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan tafsir mereka terhadap situasi tersebut,
6. orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini, sebagian karena kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan diri mereka sendiri yang memungkinkan mereka memikirkan tindakan yang mungkin dilakukan, menjajaki keunggulan dan kelemahan relatif mereka, dan selanjutnya memilih, dan
7. jalinan pola tindakan dengan interaksi ini kemudian menciptakan kelompok dan masyarakat.

Menurut Usman (2004) perspektif interaksionisme simbolik cenderung menolak anggapan bahwa fakta sosial adalah sesuatu yang determinan terhadap fakta sosial yang lain. Perspektif ini juga tidak menempatkan masyarakat sebagai satu set struktur yang berbeda dengan orang. Menurutnya orang sebagai makhluk hidup diyakini mempunyai perasaan dan pikiran. Dengan perasaan dan pikirannya orang mempunyai kemampuan memberi makna dari situasi yang ditemui. Orang tidak secara pasif menerima nilai dan norma masyarakat. Sebaliknya, orang juga bisa menemukan, menciptakan, dan membuat nilai dan norma sosial, tidak sekedar mampu untuk mempelajari nilai dan norma masyarakatnya. Karena itu orang dapat membuat, menafsirkan, merencanakan, dan mengontrol lingkungannya. Pada intinya orang tidak hanya bereaksi, tetapi juga melakukan aksi.

Untuk lebih memahami mengenai interaksionisme simbolik, Veeger (1992:100) memberikan penjelasan mengenai perbedaan gambaran masyarakat menurut perspektif interaksionisme simbolik dengan perspektif fungsionalisme, seperti yang terdapat dalam gambar berikut ini.



Soekanto (1982:8) menyatakan bahwa dasar kehidupan bersama dari manusia adalah komunikasi, untuk memahami kehidupan sosial manusia digunakan lambang-lambang (simbol). Suatu lambang merupakan tanda, benda, atau gerakan yang secara sosial dianggap memiliki arti tertentu. Menurut George Herbert Mead, manusia mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lain dengan perantaraan lambang-lambang tertentu yang dimiliki bersama. Dengan perantaraan lambang-lambang tersebut, manusia memberikan arti pada setiap kegiatannya. Mereka dapat menafsirkan keadaan dan perilaku

dengan menggunakan lambang-lambang tersebut. Manusia membentuk perspektif-perspektif tertentu melalui suatu proses sosial, mereka memberi rumusan hal-hal tertentu bagi pihak-pihak lainnya. Selanjutnya, mereka berperilaku menurut hal-hal yang diartikan secara sosial. Menurut Mead, lambang-lambang terutama bahasa tidak hanya merupakan sarana untuk mengadakan komunikasi antarpribadi, tetapi juga sarana untuk berpikir manusia.

Mead melihat berbagai proses mental sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar termasuk kecerdasan reflektif, kesadaran, citra mental, makna, dan lebih umum lagi pikiran. Manusia memiliki kemampuan khas untuk melakukan percakapan batiniah dengan dirinya sendiri. Menurut pandangan Mead, semua proses mental tidak termuat di dalam pikiran, namun dalam proses sosial. Mead sebenarnya relatif tidak banyak membahas mengenai masyarakat, yang paling umum ia pandang adalah proses sosial terus-menerus yang mendahului pikiran dan diri (Ritzer dan Goodman, 2008:416). Menurut Mead, orang tak hanya menyadari orang lain, akan tetapi juga mampu menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian, orang tidak hanya berinteraksi dengan orang lain, akan tetapi secara simbolis dia juga berinteraksi dengan dirinya sendiri (Poloma, 2004:257).

Sosiolog lain yang juga menjelaskan mengenai perspektif interaksionisme simbolik adalah Blumer. Blumer menjelaskan bahwa interaksionisme simbolik bertumpu pada **tiga premis**, yaitu:

1. manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka;
2. makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain;
3. makna-makna tersebut disempurnakan saat proses interaksi sosial berlangsung.

Blumer lebih lanjut menjelaskan bahwa bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan akan melahirkan batasan sesuatu bagi orang lain (Poloma, 2004:259).

Ada beberapa prinsip yang berkaitan dengan teori interaksionisme simbolik, yaitu:

1. manusia tidak seperti binatang, akan tetapi dibekali dengan kemampuan berpikir;
2. kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial;

3. dalam interaksi sosial, orang mempelajari makna dan simbol yang memungkinkan mereka untuk menjalankan kemampuan manusia untuk berpikir;
4. makna dan simbol memungkinkan orang bertindak dan berinteraksi;
5. orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan tafsir mereka atas situasi yang ada;
6. orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini, sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka yang memungkinkan mereka dapat menelaah tindakan yang mungkin dilakukan, menjajaki keunggulan dan kelemahan mereka, serta memilih satu di antaranya;
7. pola-pola tindakan dan interaksi yang saling berkelindan tersebut membentuk kelompok dan masyarakat.

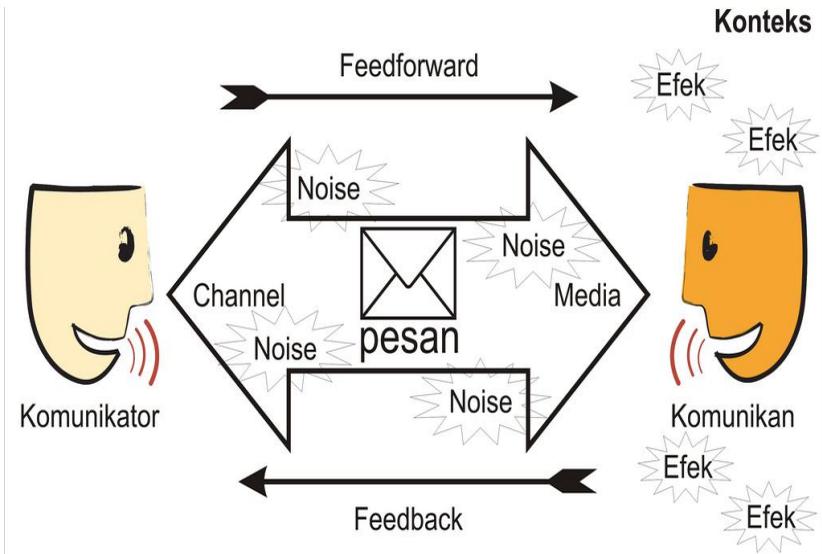
Dalam perspektif interaksionisme simbolik ini, makna dan simbol menjadi sangat penting. Simbol merupakan tanda, gerak, isyarat, dan bahasa. Simbol dijadikan sebagai sesuatu yang mengganti sesuatu yang lain, misalnya sebuah kata adalah terjemahan atau sebagai ganti barang. Dalam hidup bermasyarakat orang-orang menggunakan simbol tersebut. **Dengan menyepakati dan mendistribusikannya maka orang dengan efektif dapat menjalin sebuah komunikasi satu sama lain.** Selanjutnya karena untuk mengetahui makna dari suatu simbol itu adalah harus dengan dipelajari maka **simbol-simbol itu adalah bersifat sosial dan dipelajari melalui hidup bermasyarakat.** Anggota masyarakat berinteraksi dengan cara menafsirkan simbol-simbol yang mereka bawa.

Interaksionisme simbolik memahami bahasa sebagai suatu sistem simbol yang begitu luas. Kata-kata menjadi simbol karena mereka digunakan untuk memaknai berbagai hal. Kata-kata memungkinkan adanya simbol lain. Tindakan, objek, dan kata-kata lain hadir dan memiliki makna hanya karena mereka telah dan dapat digambarkan melalui penggunaan kata-kata. Simbol menempati posisi yang sangat krusial. Simbol pada umumnya dan bahasa pada khususnya memiliki sejumlah fungsi spesifik diantaranya (Ritzer dan Goodman, 2008 : 395):

1. Simbol memungkinkan orang berhubungan dengan dunia materi dan dunia sosial karena dengan simbol mereka bisa memberi nama, membuat kategori, dan mengingat objek yang mereka temui.
2. Simbol meningkatkan kemampuan orang mempersepsikan lingkungan.

3. Simbol meningkatkan kemampuan berpikir. Dalam hal ini berpikir dapat dipahami sebagai interaksi simbolis dengan diri sendiri.
4. Simbol meningkatkan kemampuan orang memecahkan masalah.
5. Penggunaan simbol memungkinkan seseorang melampaui waktu, ruang, dan bahkan pribadi mereka sendiri.
6. Simbol memungkinkan kita membayangkan realitas metafisis, seperti surga atau neraka.
7. Yang paling umum, simbol memungkinkan orang menghindari dari perbudakan yang datang dari lingkungan mereka. Mereka dapat lebih aktif ketimbang pasif, yaitu mengendalikan sendiri apa yang mereka lakukan.

Untuk menciptakan sebuah interaksi sosial, setidaknya-tidaknya dibutuhkan dua syarat, yaitu adanya kontak sosial serta adanya komunikasi. Terjadinya kontak sosial tidak semata-mata tergantung pada tindakan sosial, namun tanggapan terhadap tindakan yang dilakukan. Sedangkan aspek komunikasi yang terpenting adalah bila seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, penafsiran itu sendiri sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan konteks sosial. Sebagai contoh warna hitam memiliki penafsiran buruk bila berkaitan dengan dunia perdukunan, *klenik* atau santet, namun akan memiliki penafsiran baik tatkala seseorang yang menggunakan pakaian serba hitam untuk datang melayat yang bermakna ikut berduka. Selain isyarat-isyarat fisik tersebut, digunakan pula simbol-simbol suara berupa kata-kata yang memiliki arti bersama dan bersifat standar. Manusia dapat berkomunikasi tentang objek dan tindakan yang jauh di luar waktu dan ruang. Misalnya ketika kita menyebut bahwa bentuk bumi seperti bola maka yang akan dibayangkan adalah bentuk bumi yang bulat. Bahkan untuk hal-hal yang belum pernah dilihat sebelumnya, misalnya ketika seorang anak kecil diceritakan tentang setan maka yang terbayangkan adalah sosok yang menyeramkan dan menakutkan.



<http://www.ilna98.com/images/komunikasi.jpg>

Simbol-simbol yang digunakan dalam berinteraksi dan komunikasi juga tidak mutlak bersifat universal yang berlaku untuk semua wilayah atau daerah. Makna dari suatu simbol tergantung dari penafsiran yang disepakati bersama oleh masyarakat yang menggunakan simbol tersebut. Suatu simbol dapat dipahami melalui sebuah proses interpretasi. Sebagai contoh, orang yang menengadahkan tangannya dapat diinterpretasikan sebagai orang yang memintaminta, tetapi juga dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain untuk mempersilakan orang lain jalan terlebih dahulu. Contoh lainnya adalah ketika masyarakat Indonesia menafsirkan gelengan kepala sebagai tanda tidak setuju, namun bagi masyarakat India gelengan kepala diartikan sebagai tindakan menyetujui.

Coba Anda jelaskan kembali dengan kalimat Anda sendiri pengertian dari perspektif internasional simbolik!

Perlu Anda pahami bahwa perspektif interaksionisme simbolik banyak menekankan telaah tentang konsep interaksi



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Buatlah skema yang menggambarkan inti pemikiran dari tokoh-tokoh perspektif interaksionisme simbolik!

Petunjuk Jawaban Latihan

Tokoh-tokoh dalam perspektif konflik adalah Herbert Mead, Charles Horton Cooley, W.I. Thomas, Herbert Blumer, dan Erving Goffman. Setiap tokoh memiliki fokus perhatian masing-masing. Diskusikan dengan teman Anda.



RANGKUMAN

Perspektif interaksionisme simbolik menekankan pada telaah mengenai bagaimana orang-orang berinteraksi baik pada tataran kelompok maupun lembaga, masyarakat atau negara. Penganut perspektif ini lebih memperhatikan interaksi yang terjadi antara individu dan kelompok dengan menggunakan simbol-simbol, tanda-tanda, isyarat-isyarat, dan kata-kata yang berupa lisan maupun tulisan.

Soekanto (8:1982) menyatakan bahwa dasar kehidupan bersama dari manusia adalah komunikasi, untuk memahami kehidupan sosial manusia digunakan lambang-lambang (simbol). Suatu lambang merupakan tanda, benda, atau gerakan yang secara sosial dianggap memiliki arti tertentu. Menurut George Herbert Mead, manusia mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lain dengan perantaraan lambang-lambang tertentu yang dimiliki bersama. Dengan perantaraan lambang-lambang tersebut maka manusia memberikan arti pada setiap kegiatannya. Dalam perspektif interaksionisme simbolik ini, makna dan simbol menjadi sangat penting. Simbol merupakan tanda, gerak, isyarat, dan bahasa. Simbol dijadikan sebagai sesuatu yang mengganti sesuatu yang lain.

Simbol-simbol yang digunakan dalam berinteraksi dan komunikasi juga tidak mutlak bersifat universal yang berlaku untuk semua wilayah atau daerah. Makna dari suatu simbol tergantung dari penafsiran yang disepakati bersama oleh masyarakat yang menggunakan simbol tersebut. Sebagai contoh adalah ketika masyarakat Indonesia menafsirkan gelang kepala

sebagai tanda tidak setuju, namun bagi masyarakat India gelengan kepala diartikan sebagai tindakan menyetujui.

Beberapa penganut interaksionisme simbolik dalam Ritzer dan Goodman (2008) mengemukakan prinsip dasar teori ini, yaitu manusia ditopang oleh kemampuan berpikir tidak seperti binatang yang lebih rendah; kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial; dalam interaksi sosial orang mempelajari makna dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir tersebut; makna dan simbol memungkinkan orang melakukan tindakan dan interaksi khas manusia; orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan tafsir mereka terhadap situasi tersebut; orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini; dan jalinan pola tindakan dengan interaksi ini kemudian menciptakan kelompok dan masyarakat.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Tokoh yang mengungkapkan pemahamannya mengenai perspektif struktural fungsional adalah
 - A. Auguste Comte
 - B. Talcot Parson
 - C. Horton Cooley
 - D. Herbert Spencer

- 2) Tokoh yang mengatakan bahwa manusia dapat bertindak tepat ketika telah menetapkan atau mengetahui sifat dan situasinya sebagai definisi situasi adalah
 - A. Auguste Comte
 - B. Dahrendorf
 - C. Emile Durkheim
 - D. W.I. Thomas

- 3) Menurut Mead, lambang-lambang terutama bahasa
 - A. hanya merupakan sarana untuk mengadakan komunikasi antarpribadi
 - B. hanya merupakan sarana untuk berpikir manusia
 - C. bukan sarana untuk mengadakan komunikasi antarpribadi dan bukan sarana untuk berpikir manusia
 - D. tidak hanya merupakan sarana untuk mengadakan komunikasi antarpribadi, tetapi juga sarana untuk berpikir manusia

- 4) Menurut pandangan Mead, semua proses mental termuat dalam
- pikiran manusia
 - proses sosial
 - pikiran manusia dan proses sosial
 - pikiran manusia atau proses sosial
- 5) Dalam menjelaskan interaksionisme simbolik, Herbert Blumer bertumpu pada premis bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, makna tersebut berasal dari
- imajinasi individu
 - tujuan kelompok
 - interaksi sosial seseorang dengan orang lain
 - kesepakatan antara individu dengan masyarakat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. Beberapa tokoh yang mengungkapkan pemahamannya mengenai perspektif struktural fungsional diantaranya Auguste Comte, Herbert Spencer, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Emile Durkheim, Talcott Parson, Robert K. Merton, serta tokoh-tokoh lainnya.
- 2) A. Durkheim memberikan pandangan mengenai struktur sosial relatif ortodoks.
- 3) A. Karakteristik dasar dari fakta sosial adalah bersifat eksternal, memaksa, serta umum.
- 4) C. Seperangkat persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem sosial meliputi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, serta *Latent Pattern Maintenance*.
- 5) C. Perspektif fungsional melihat struktur pada pandangan makro.

Tes Formatif 2

- 1) D. Model analisis yang dikembangkan dalam perspektif konflik adalah pertentangan, hubungan super ordinasi dan subordinasi, perbedaan kekuasaan, dan perubahan sosial.
- 2) A. Salah satu pemahaman yang mewarnai perspektif konflik adalah teori yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam *Communist Manifesto*.
- 3) D. Dahrendorf menyatakan bahwa pendekatan konflik berpangkal pada beberapa anggapan dasar, *pertama*, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. *Kedua*, setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya. *Ketiga*, setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. *Keempat*, setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain.
- 4) B. Kekuasaan tidak melekat dalam diri individu tetapi pada posisi orang dalam masyarakat.

- 5) A. Nyi mengungkapkan bahwa konflik paling tidak mempunyai lima sumber penyebab, yaitu (1) kompetisi, satu pihak berupaya meraih sesuatu dengan mengorbankan pihak lain, (2) dominasi, satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar, (3) kegagalan, menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian tujuan, (4) provokasi, satu pihak sering menyinggung perasaan yang lain dan (5) perbedaan nilai, terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya suatu masalah.

Tes Formatif 3

- 1) C. Beberapa tokoh sosiolog yang mengembangkan perspektif ini diantaranya George Herbert Mead, Charles Horton Cooley, W.I. Thomas, Herbert Blumer, dan Erving Goffman
- 2) D. Manusia dapat bertindak tepat ketika telah menetapkan atau mengetahui sifat dan situasinya yang oleh W.I. Thomas dinyatakan sebagai definisi situasi
- 3) D. Menurut Mead, lambang-lambang terutama bahasa tidak hanya merupakan sarana untuk mengadakan komunikasi antar pribadi, tetapi juga sarana untuk berpikir manusia
- 4) B. Menurut pandangan Mead, semua proses mental tidak termuat di dalam pikiran, namun dalam proses sosial
- 5) C. Dalam menjelaskan interaksionisme simbolik, Herbert Blumer bertumpu pada premis bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain

Daftar Pustaka

- Fisipol UGM. 1994. *Diktat Bahan Kuliah Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta.
- Hamilton, Peter (editor). 1990. *Talcott Parsons dan Pemikirannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nasikun. 1991. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- Nitibaskara, R.R.T. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, dan Sosiologi*. Jakarta, Peradaban.
- Poloma, Margareth. 2004. *Sosiologi Kontemporer 2004*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pruit, Dean G. dan Jeffrez Z. Rubbin, Penerjemah Helly P. Setjipto dan Sri Mulyani Soetjipto. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto. 2007. *Sosiologi Untuk Pemula*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, Penerjemah Nurhadi. 2004. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Sociological Theory)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Teori Sosiologi: Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indah.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: CIREDA.
- Ustman, Sabian. 2006. *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan, Sebuah Penelitian Sosiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Veeger, Karel. J. dkk. 1992. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kerja sama Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTİK) dan PT Gramedia Pustaka Utama.